



Judul : Soal normalisasi dengan Israel, DPR:RI bersama rakyat Palestina
Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Normalisasi Dengan Israel DPR: RI Bersama Rakyat Palestina

DPR menepis wacana normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Kalangan Senayan memastikan, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina, melawan penjajahan Israel terhadap negara tersebut.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, Indonesia belum melakukan pembicaraan tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Komitmen pemerintah Indonesia terkait penegakan hukum atas kedaulatan Palestina belum berubah, dan akan terus berjuang bersama rakyat Palestina.

Yang pasti, ujarnya, pemerintah dan rakyat Indonesia, mendukung penuh kedaulatan dan hak-hak Palestina. Sejauh ini, dia mengakui belum mendengar adanya perubahan komitmen pemerintah. "Saya mempertanyakan dasar klaim yang menyebutkan perubahan sikap Indonesia," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, sejumlah media internasional mengabarkan, Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel akan dilakukan dalam waktu dekat, sebelum masa jabatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berakhir.

Melanjutkan keterangannya, Azis mengatakan, Indonesia tak memiliki masalah dengan negara mana pun, termasuk Israel. Namun, tak ada normalisasi hubungan dalam waktu dekat, terlebih dikaitkan dengan masa jabatan Presiden Amerika.

"Yang kami perjuangkan justru hak masyarakat Palestina agar bisa hidup sebagai negara berdaulat. Ini yang kita harapkan dari Israel," tegas mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Lebih lanjut, Wakil Ketua

DPR bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini berharap, Israel segera menyelesaikan persoalan dengan Palestina dan mengakui hak teritorial Palestina sebagai negara berdaulat. Dengan begitu, normalisasi hubungan Indonesia-Israel bisa terbangun, karena ada rasa percaya antara kedua negara.

"Dalam membangun normalisasi kan butuh saling percaya, saling menghormati dan memiliki visi yang sama. Jika persoalan Palestina bisa tuntas, tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi tidak akan ada maknanya," jelas Politisi Partai Golkar ini.

Secara terpisah, Ketua Komisi I Meutya Hafid menyatakan, Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab, penjajahan Israel atas Palestina masih terjadi.

Indonesia, ujarnya, belum mengubah Pembukaan UUD 1945 yang menyebut "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prike manusiaan dan prikeadilan". Sehingga Indonesia tidak akan dan tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel.

Juni lalu, lanjut Meutya, Indonesia telah mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel pada rapat tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB. Hal itu merupakan bentuk konsistensi bangsa Indonesia. Dia meyakini, pemerintah Indonesia tak pernah melakukan kontak dengan Israel.

"Saat ini, media asing pro Israel tengah mengangkat isu antara Indonesia dengan Israel. Tujuannya, melemahkan dukungan pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina," jelas mantan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR ini. ■ ONI